

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam menopang kestabilan tingkat perekonomian di Indonesia. Berbagai sektor perekonomian yang melibatkan uang menjadi salah satu hal yang dibutuhkan. Lembaga keuangan merupakan salah satu sektor yang dinilai mampu meningkatkan kondisi ekonomi di Indonesia adalah lembaga pembiayaan. Kedudukan lembaga pembiayaan sendiri adalah sebagai lembaga intermediasi yang dapat membatu menyongsong perekonomian masyarakat dalam hal menghimpun, mendistribusikan kembali, dan mengatur dana yang dikumpulkan dari masyarakat.

Masyarakat yang memiliki dana lebih biasanya menyimpan kelebihan dana tersebut ke dalam bentuk investasi yang beragam seperti emas, bangunan, tanah, deposito, saham, dan surat-surat berharga lainnya guna memperoleh keuntungan yang lebih besar di masa mendatang. Sedangkan bagi masyarakat lainnya yang kekurangan dana, maka dapat memenuhi kekurangan tersebut dengan cara meminjam kepada pihak lain atau kepada lembaga lainnya, bisa dengan berbentuk uang tunai maupun bentuk lainnya yang dapat dicairkan untuk dapat memenuhi kekurangan tersebut. Bagi sebagian orang yang kekurangan dana, sangatlah penting baginya peran dari suatu lembaga pembiayaan untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka (Manahaar, 2019).

Berkaca dalam kehidupan sehari-hari, uang merupakan alat tukar yang biasanya digunakan untuk membeli berbagai macam kebutuhan hidup, yang menjadi permasalahan disini apabila kebutuhan yang ingin dibeli tidak sebanding dengan uang yang dimilikinya. Jika kebutuhan mendesak dan memerlukan dana dalam jumlah besar maka akan sulit dipenuhi dalam jangka pendek, apalagi jika harus meminjam lewat lembaga perbankan karena merasa prosedur kreditnya terlalu berbelit-belit. Akibatnya banyak dari mereka mencari solusi instan melalui lembaga pembiayaan informal seperti rentenir.

Kecenderungan seperti ini mungkin sekali dilakukan karena persyaratan yang harus dipenuhi terbilang cukup mudah, tidak sulit untuk diakses dan proses pencairannya pun dapat dilakukan dalam rentan waktu yang singkat. Namun terlepas dari kemudahannya, rentenir atau sejenisnya memiliki bunga cicilan yang tinggi serta biaya keterlambatan yang mencekik apabila tidak dapat menyicil atau melunasi tagihan sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian. hal ini tentu saja sangat menyengsarakan masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah yang kurang faham akan resiko transaksi tersebut (Busriadi, 2015). Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki kebutuhan dana mendesak perlahan-lahan mulai beralih kepada produk penyaluran kredit yang lebih aman dan mudah seperti dengan cara gadai kepada PT. Pegadaian.

PT. Pegadaian (Persero) disini berperan sebagai perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bentuk produk jasa keuangan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, aman, terpercaya serta pelayanan yang baik. Sebagaimana hukum gadai yang berlaku bahwasanya kreditur memiliki kewajiban menyerahkan property bergerak miliknya sebagai jaminan kepada pihak debitur. Apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi pinjaman setelah mencapai batas waktu perjanjian yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian memiliki hak untuk melelang barang tersebut (Setyawan, 2020).

Perusahaan Pegadaian didaulat sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tujuan khusus yakni menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai untuk mencegah praktek pegadaian gelap serta pinjaman tidak wajar lainnya. Adapun sebagian besar nasabah dari PT. Pegadaian terdiri dari masyarakat kurang mampu yang termasuk golongan ekonomi lemah yang kurang mendapat fasilitas kredit dari lembaga keuangan perbankan (Hamdani et al., 2020).

Seiring dengan meningkatnya perkembangan perekonomian dewasa ini juga mempengaruhi lembaga lain seperti lembaga pembiayaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan inovasi-inovasi dalam produk keuangan. Sebagaimana keadaan di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar didunia, dengan terdapat sekitar 250 juta penduduk dengan komposisi

muslim mencapai sekitar 83%. Keberadaan penduduk yang didominasi dengan masyarakat muslim menjadi potensi tersendiri bagi berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia (Ali, 2015). Dimana dengan kondisi ini banyak bermunculan produk-produk berbasis syariah yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan dari berbagai sektor termasuk PT. Pegadaian (Persero).

Pegadaian sendiri terdiri dari dua unit usaha yaitu berbasis konvensional dan syariah, meskipun begitu keduanya sama-sama berada dalam naungan pegadaian itu sendiri. Konsep operasional dalam pegadaian syariah berpatok pada azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang disesuaikan berdasarkan nilai-nilai dalam islam.

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga di Indonesia yang memiliki izin secara resmi untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat yang didalam praktiknya berpegang teguh pada prinsip syariah. Alur dan proses pelayanan yang diberikan Pegadaian Syariah tidak berbeda dengan pegadaian konvensional pada umumnya, namun yang membedakan disini nasabah tidak dikenakan biaya sewa modal, sebagai gantinya dikenakan tarif *ujrah* atau imbalan yang dihitung berdasarkan taksiran nilai barang jaminan yang diserahkan. Maksimal besaran tarif *ujrah* adalah 0,71% per 10 hari dengan rentan waktu yang diberikan maksimum 4 bulan atau 120 hari, apabila nasabah ingin memperpanjang perjanjian dapat dilakukan dengan cara mengangsur maupun mengulang gadai, dapat pula dilunasi secara langsung sewaktu-waktu dengan ketentuan tarif *ujrah* tertentu (Rubianti, 2019). Karena alasan inilah, masyarakat mulai beralih ke pembiayaan kredit berbasis syariah.

*Rahn* bukan merupakan satu-satunya produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat. Produk-produk lain yang juga termasuk adalah Arrum dan Mulia. Arrum atau Ar-Rahn (untuk usaha mikro) merupakan pembiayaan berbasis syariah yang ditujukan bagi UMKM yang ingin meembangkan usahanya dengan skema pengembalian angsuran dengan BPKP sebagai jaminannya, sedangkan kendaraan fisik tetap pada berada pada nasabah untuk digunakan sebagai penunjang operasional usahanya. Sedangkan Mulia adalah wadah investasi emas bagi masyarakat yang disediakan pegadaian dengan angsuran dan jangka waktu tertentu. Berdasarkan data laporan keuangan yang di *publish* oleh Pegadaian Syariah,

menunjukkan bahwa Rahn mendominasi pembiayaan penyaluran kredit dibandingkan dengan Arrum dan Mulia. Berikut adalah data terkait yang telah diolah dalam tabel :

**Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah Kredit yang Disalurkan Rahn, Arrum, dan Mulia (Jutaan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Rahn</b>	<b>Arrum</b>	<b>Mulia</b>
2010	4.473.135	92.210	176.498
2011	7.822.599	102.700	986.596
2012	11.122.405	87.840	998.768
2013	11.535.454	133.837	1.289.693
2014	11.722.736	200.333	837.546
2015	13.077.842	339.403	594.007
2016	14.096.938	536.107	819.516
2017	14.949.915	784.131	850.180
2018	16.319.497	1.092.603	917.253
2019	18.897.575	2.200.870	807.123

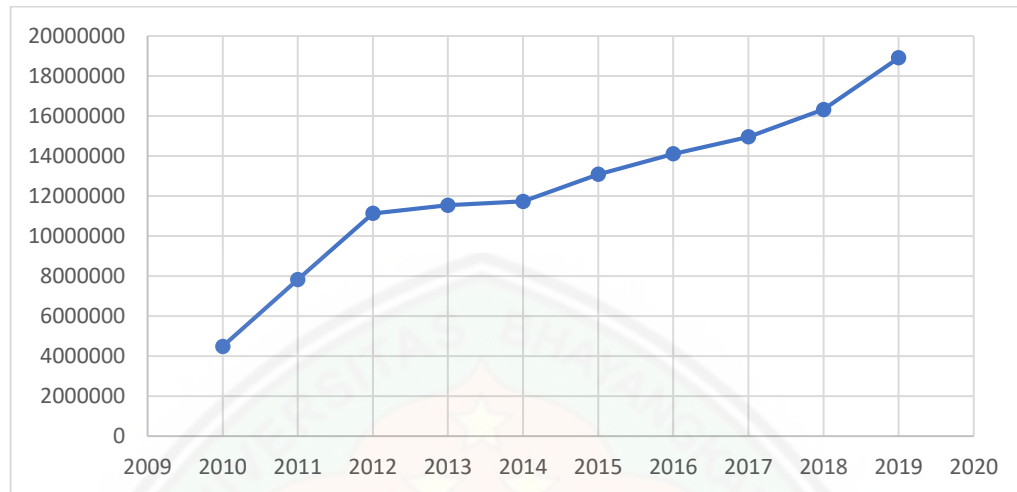
Sumber : Laporan Tahunan PT. Pegadaian

Tabel 1.1 diatas menggambarkan data produk pembiayaan Pegadaian Syariah berdasarkan laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh Pegadaian periode 2010-2019. Dapat dilihat bahwa perkembangan pembiayaan *Rahn* jauh lebih unggul dibanding dengan *instrument* pembiayaan lain. Hal ini dikarenakan Arrum dan Mulia merupakan jenis produk yang tergolong baru dan baru dikenalkan pada tahun 2008. Untuk itu, masyarakat lebih banyak menggunakan *Rahn* yang lebih familiar dan mudah diterima oleh telinga mereka. Karena alasan ini, untuk menganalisis data diperlukan jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan masyarakat yaitu pembiayaan *Rahn* (Ulum, 2019).

Apabila membahas mengenai produk yang paling diminati dalam penyaluran pembiayaan di Pegadaian Syariah maka pembahasan mengenai perkembangan tingkat penyaluran kredit *rahn* pada Pegadaian Syariah menjadi tidak terelakan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa *rahn* merupakan produk dengan tingkat

penyaluran paling tinggi dibandingkan dua produk lainnya, tingkat penyaluran kredit rahn sendiri dapat dijelaskan pada data grafik 1.1 dibawah :

**Grafik 1. 1 Perkembangan Tingkat Penyaluran Kredit Rahn PT. Pegadaian Syariah Periode 2010-2019 (Jutaan Rupiah)**



Sumber : Annual Report PT. Pegadaian Syariah

Berdasarkan data pada grafik 1.2 diatas mengenai perkembangan tingkat penyaluran kredit rahn PT. Pegadaian Syariah Periode 2010-2019 dapat dilihat bahwa grafik mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pinjaman yang diberikan oleh bisnis syariah (*rahn*) secara rata-rata mengalami pertumbuhan yang cukup pesat selama periode 10 tahun. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah pinjaman yang diberikan pada 2010 hanya berjumlah Rp. 4,4 Triliun berkembang menjadi Rp. 18 Triliun pada tahun 2019. Peningkatan paling besar dan spesifik terjadi pada tahun 2019 dimana tingkat penyaluran kredit naik sebesar 14,80% dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 9,2%. Sedangkan peningkatan paling sedikit terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,62%. Pada tahun-tahun yang lain peningkatan cenderung fluktuatif dan stabil meningkat. Kemudahan penyaluran pembiayaan yang diberikan Pegadaian Syariah membuat masyarakat yang belum bisa menggunakan jasa perbankan dan lebih memilih kredit ilegal perlahan-lahan mulai beralih ke Pegadaian Syariah.

Efisiensi kinerja dalam mengelola dan memanfaatkan aset produksi Pegadaian Syariah dinilai cukup baik dibandingkan dengan 4 pesaingnya yaitu Bank Syariah

Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank BRI Syariah dimana rata-rata dari efisiensi produk gadai keempat bank syariah tersebut sebesar 97,3%. Nilai tersebut cukup tinggi namun belum mampu melebihi angka efisiensi Pegadaian Syariah yang mencapai 100% berturut turut dari tahun 2008 sampai tahun 2014 (Roikhan, 2017). Ini menandakan bahwa kinerja pegadaian syariah sudah lebih baik dari para pesaingnya. Untuk dapat mempertahankan konsistensi kinerja pegadaian yang unggul, pegadaian perlu memperhatikan faktor-faktor sekeliling yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan baik secara langsung atau tidak sedangkan faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan.

Tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah merupakan dua contoh keadaan atau kondisi yang berasal dari luar lingkup akan tetapi bisa berdampak langsung terhadap perusahaan apalagi perusahaan yang berkecimpung diranah ekonomi. Fluktuasi inflasi yang tidak terduga bisa mempengaruhi perekonomian rumah tangga terganggu. Apalagi tingkat fluktuasi yang cukup tinggi yang memengaruhi kenaikan harga-harga dipasar. Dampaknya, banyak masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya dan akhirnya mencari solusi dengan jasa pembiayaan gadai.

Faktor eksternal lain yaitu faktor nilai tukar uang, perlu diketahui, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar (USD) berpengaruh terhadap kredit yang disalurkan, hal ini terjadi karena terdepresiasi nilai tukar rupiah akan diikuti dengan meningkatnya biaya produksi terutama produsen yang menggunakan bahan baku impor, maka kebutuhan akan modal pun semakin meningkat.

Selain dari faktor eksternal yang telah dijelaskan sebelumnya, penyaluran kredit rahn juga tidak luput dari pengaruh internal perusahaan sendiri. Misalnya pendapatan pegadaian, pendapatan pegadaian yang baik bisa membantu perusahaan untuk mempertahankan kinerjanya. Semakin banyak pendapatan yang diperoleh pegadaian maka semakin banyak pula kredit yang dapat disalurkan. Tingkat inflasi, nilai tukar rupiah dan pendapatan pegadaian merupakan indikator yang tepat untuk

mengukur penyaluran kredit karena ketiga variabel tersebut sudah bisa mewakili antara faktor eksternal dan internal perusahaan.

Terdapat *research gap* atau penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak sejalan. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Maheny et al., 2020), menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Namun hasil penelitian tersebut dibantah oleh penelitian (Lestari, 2019) yang mengatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit karena dalam proses pengajuan kredit masyarakat tidak menghiraukan peningkatan inflasi melainkan lebih kepada kebutuhan dana yang mendesak.

Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh (Igirisa, 2017) dimana penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel nilai tukar uang berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit sedangkan penelitian (Risal Rinofah, 2015) menunjukkan hasil bahwa nilai tukar uang tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Hal ini dapat dikarenakan dua hal yang pertama, nilai tukar rupiah lebih bersifat nasional yang tidak terlalu berpengaruh pada kondisi ekonomi lokal, dan kemungkinan terakhir adalah karena pembiayaan pada masyarakat merupakan hal yang perkembangannya tidak terlalu berpatok pada kebijakan-kebijakan makro dibanding usaha konglomerasi lain.

Faktor internal juga tidak dapat dipungkiri kehadirannya dalam mempengaruhi penyaluran kredit, faktor internal yang dimaksud salah satunya adalah pendapatan pegadaian itu sendiri. Pendapatan pegadaian merupakan pendapatan yang diperoleh atas pemindahan hak guna dari suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu dengan sistem pembayaran/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.

Menurut penelitian oleh (Damanhur, 2017) faktor internal pendapatan pegadaian tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit rahn karena adanya kredit macet pada pemberian kredit yang menyebabkan penundaan penerimaan uang yang berasal dari modal serta sewa modal akibat adanya penundaan pelelangan barang jaminan dari kredit macet sehingga menyebabkan laba yang diterima menurun.. Hal ini dibantah oleh penelitian yang dilakukan oleh (Haryanti et al., 2019) yang mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antar variabel pendapatan

pegadaian dan penyaluran kredit *rahn*. Semakin meningkatnya pendapatan Pegadaian maka semakin meningkat pula pembiayaan yang akan disalurkan oleh Pegadaian.

Berdasarkan ketidaksinambungan antar variabel dari penelitian-penelitian sebelumnya dimana variabel yang sama ternyata memiliki hasil yang bertolak belakang dengan hasil penelitian lain, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian, yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Pendapatan Pegadaian Terhadap Penyaluran Kredit Rahn PT. Pegadaian Syariah Periode Tahun 2010-2019”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini antara lain :

1. Apakah tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan rahn PT. Pegadaian Syariah ?
2. Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan rahn PT. Pegadaian Syariah ?
3. Apakah pendapatan pegadaian berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan rahn PT. Pegadaian Syariah ?
4. Apakah tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan pendapatan pegadaian secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan rahn ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap pembiayaan rahn PT. Pegadaian Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan rahn PT. Pegadaian Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pegadaian terhadap pembiayaan rahn PT. Pegadaian Syariah.



4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan pendapatan pegadaian terhadap pembiayaan rahn secara simultan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **a. Bagi Pegadaian Syariah**

Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberi manfaat guna mengambil keputusan dimasa depan yang berkaitan dengan pembiayaan *rahn* serta mengenai strategi baru khususnya terhadap produk berbasis syariah.

##### **b. Bagi Nasabah**

Peneliti berharap informasi yang tersedia dalam penelitian ini bisa mempermudah calon nasabah yang ingin menggunakan produk jasa gadai di Pegadaian Syariah dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan apabila calon nasabah ingin melakukan pinjaman kredit kepada Pegadaian Syariah.

##### **c. Bagi Peneliti**

Melalui penelitian ini peneliti mendapat banyak pembelajaran serta pengetahuan baru mengenai tata cara melakukan penelitian yang diharapkan hal ini bisa menjadi pembelajaran dan pacuan kepada peneliti agar bisa belajar hal yang lebih banyak dimasa depan.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan terfokus maka peneliti membataskan penelitian ini pada :

1. Penelitian ini hanya fokus membahas permasalahan penyaluran kredit seputar variable yang telah ditentukan yaitu tingkat inflasi, nilai tukar rupiah dan pendapatan pegadaian pada periode tahun 2010-2019.
2. Batasan data keuangan yang diteliti adalah laporan keuangan PT. Pegadaian Syariah pada periode tahun 2010-2019.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dipaparkan secara lebih rinci sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian mengenai landasan teori yang mendasari topik penelitian yang dibahas, model konseptual dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang desain penelitian yang akan diterapkan peneliti, jenis dan sumber data, populasi, sample penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas mengenai gambaran objek penelitian, hasil analisis data, pembahasan dan paparan mengenai hasil penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini yang merupakan bab akhir dikemukakan kesimpulan serta implikasi manajerial yang diperoleh berdasarkan runtutan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.